



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BALITBANGDA PROVINSI JAMBI

TAHUN 2021 - 2026



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAMBI**

Jl. R.M. Nur Atmadibrata No.01 Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 669352 Fax (0741)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi, sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merespon dinamika perubahan kebijakan terutama dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta adanya wabah pandemi COVID-19.

Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini berisi rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman bagi Balitbangda Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugasnya di bidang Penelitian dan Pengembangan sejalan dengan Visi, Misi Gubernur Jambi periode 2021-2026 dengan visi ***“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah Dan Profesional Di Bawah Ridho Allah SWT”***.

Kami menyadari bahwa Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini masih belum sempurna. Segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Renstra ini akan diterima dengan senang hati. Akhir kata, semoga Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Balitbangda Provinsi Jambi.

Jambi, 2022
Kepala Badan,



Ir. AZRIN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660224 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYAN UMUM	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya.....	28
2.3. Pelayanan Kinerja.....	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan.....	48
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	53
BALITBANGDA	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	53
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2021-2026	54
3.3. Telaah Renstra K/L.....	63
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	67
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	70
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.	73
4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah	73
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	77

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	80
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	91
BAB VIII	PENUTUP.....	92

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Daftar Sarana dan Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi per 30 Juni 2021.....	31
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi	33
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Balitbangda Provinsi Jambi	46
Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH.....	59
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Provinsi Jambi.....	75
Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran dengan Arah Kebijakan Strategis Balitbangda Provinsi Jambi.....	78
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Balitbangda Provinsi Jambi.....	82
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Jambi yang Mengacu pada Sasaran RPJMD.....	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Resntra Balitbangda Provinsi Jambi.....	3
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Provinsi Jambi.....	27
Gambar 2.2. Grafik Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural per 30 Juni 2021.....	28
Gambar 2.3. Grafik Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan per 30 Juni 2021....	29
Gambar 2.4. Grafik Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin per 30 Juni 2021.....	29
Gambar 2.5. Grafik Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 30 Juni 2021.....	30

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dilantik pada tanggal 7 Juli 2021. Renstra OPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan

berkelanjutan. Adapun Fungsi dari Renstra OPD, yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

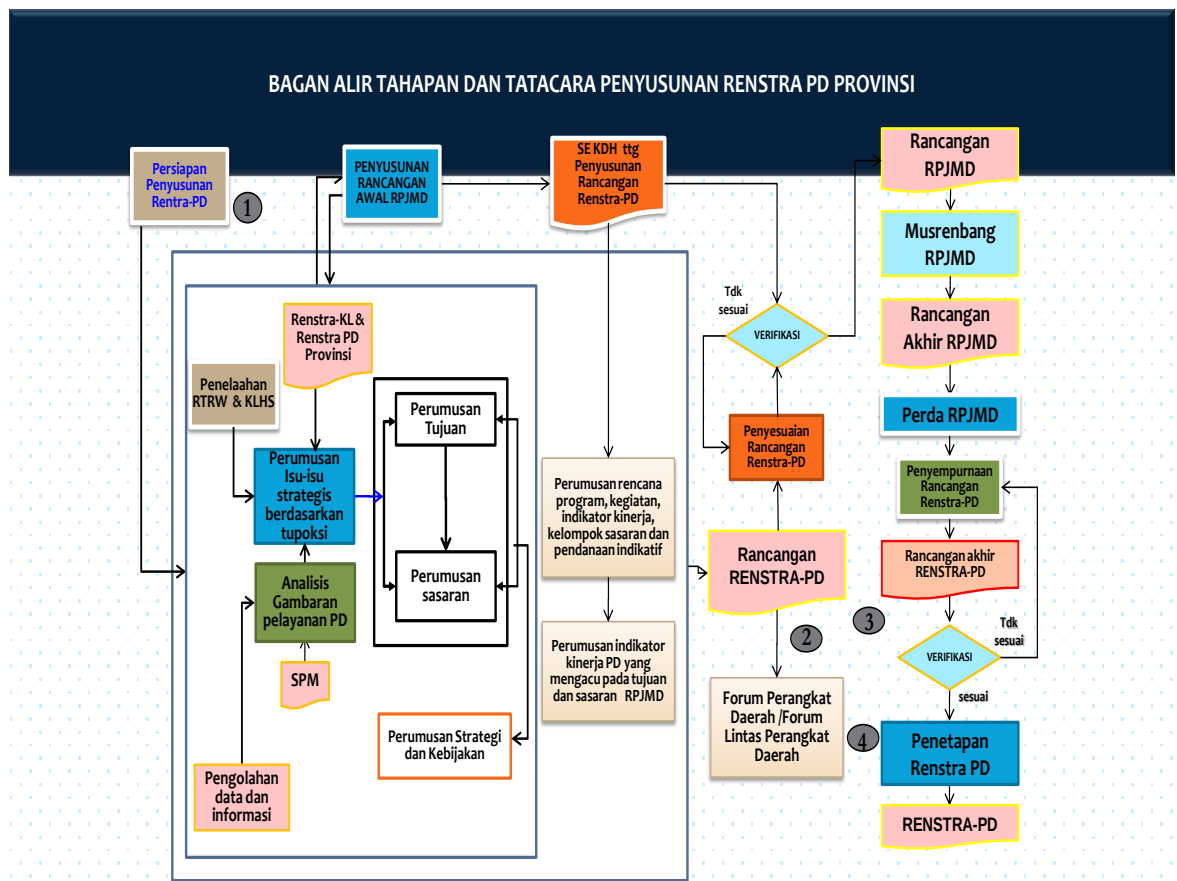
Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Disamping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun terhitung Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Dokumen ini sebagai platform atas pelaksanaan visi dan misi Balitbangda Provinsi Jambi dalam komitmennya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi periode 2021-2026. Dengan kata

lain, Renstra ini akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Balitbangda.

Proses penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra hingga penetapan Renstra dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1. berikut ini :



Gambar 1.1. Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Jambi

Perumusan rancangan Renstra Balitbangda Provinsi Jambi mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD 2021-2026;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja;
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan serta pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD 2021-2026; dan
- h. perumusan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Renstra Balitbangda Provinsi Jambi akan menjadi pedoman dalam merumuskan Rencana Kerja Tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Balitbangda Provinsi Jambi.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pentingnya Renstra bagi Balitbangda Provinsi Jambi untuk mempermudah proses penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah, yang akan dijadikan acuan dalam penilaian kegiatan yang strategis bagi pimpinan organisasi dalam kurun waktu 5 tahun.

a. Maksud

Penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai kerangka acuan strategis dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan mengantisipasi perubahan kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan maupun *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka percepatan program pembangunan dan sebagai pedoman Balitbangda Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi serta untuk mempermudah dalam mengukur serta mengevaluasi kinerja Balitbangda Provinsi Jambi sehingga menghasilkan rumusan strategis, fokus arah kebijakan dan program pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun, yaitu :

1. Memberikan arah dan pedoman kepada Aparatur Internal Balitbangda Provinsi Jambi, kabupaten/kota dan *stakeholders* terkait dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang bersinergi dengan rencana pembangunan daerah dan nasional.
2. Membangun sistem kerja Balitbangda Provinsi Jambi yang akuntabel dengan menjadikan Renstra sebagai salah satu tolok ukur pelaksanaan tugas pokok fungsi Balitbangda Provinsi Jambi.
3. Memberikan dorongan moral bagi aparatur Balitbangda Provinsi Jambi guna meningkatkan komitmen kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Memberikan kerangka dasar dalam perumusan kebijakan, guna percepatan pencapaian program pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang logis dan utuh tentang keseluruhan isinya, Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan umum tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA PROVINSI JAMBI

Bab ini memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Balitbangda Provinsi Jambi/susunan kepegawaian dan perlengkapan, kinerja

pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BALITBANGDA PROVINSI JAMBI**

Bab ini memuat penjelasan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra K/L dan renstra, telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat penjelasan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Balitbangda Provinsi Jambi.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat penjelasan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Balitbangda Provinsi Jambi.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Bab ini memuat penjelasan tentang rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat penjelasan tentang Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini Penutup, sebagai bagian akhir dari Dokumen Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA PROVINSI JAMBI

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Balitbangda Provinsi Jambi merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2020 tertanggal 27 Januari 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, Balitbangda Provinsi Jambi dengan Tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di Pemerintahan Provinsi;
2. penyusunan perencanaan program anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
3. pelaksanaan kegiatan kelitbangan di pemerintahan provinsi;
4. pembinaan dan fasillitasi kelitbangan kepada Perangkat Daerah pelaksana kelitbangan kab/kota;
5. pelaksanaan fasilitasi, promosi dan evaluasi inovasi daerah;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan di provinsi;

7. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan lingkup pemerintah provinsi;
8. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada balitbangda;
9. memberikan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitiannya oleh instansi yang berwenang;
10. permintaan laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Warga Negara Asing di daerah;
11. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi; dan
12. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Tugas dan fungsi masing masing jabatan eselon III pada Balitbangda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka mengoordinasikan penyiapan rencana program dan anggaran kelitbangan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup badan dan sekretariat.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program dan anggaran kelitbangan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja kelitbangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumatanngaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset serta dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi dan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
 - pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan perkantoran;
 - penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga, humas dan keprotokolan;
 - penyiapan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - penyiapan bahan administrasi kepegawaian;
 - penyelenggaraan urusan dokumentasi dan informasi umum dan kepegawaian; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, pengelolaan aset, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
 - pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan dan aset;
 - pengumpulan data dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran keuangan dan aset;
 - penyiapan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;

- pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan akuntansi;
 - penyusunan laporan keuangan dan aset;
 - pelaksanaan pemeliharaan aset; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya
- Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan data bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- pengumpulan bahan dokumen perencanaan dan anggaran meliputi rencana strategis dan rencana kerja badan dan dokumen perencanaan lainnya;
 - pengumpulan bahan dan penyiapan rencana kerja dan anggaran (RKA) badan;
 - penyiapan bahan koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelitbangan;
 - pengelolaan sistem informasi pelaporan pelaksanaan program kelitbangan di lingkungan badan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL BUDAYA DAN KEPENDUDUKAN

Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan mempunyai tugas membantu Badan melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi, konfirmasi, konsultasi di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitbangan di bidang pemerintahan sosial budaya dan kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan sosial budaya dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan, sosial budaya dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan, sosial budaya dan kependudukan;
- e. penyiapan bahan rekomendasi hasil kelitbangan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha di bidang , sosial budaya dan kependudukan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan terdiri dari :

- Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di subbidang pemerintahan;
 - pelaksanaan kegiatan kelitbangan di subbidang pemerintahan;
 - penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan sub bidang pemerintahan;

- penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di sub bidang pemerintahan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di bidang sosial budaya dan kependudukan, meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, masyarakat terpendil, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
- pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di sub bidang pemerintahan;
 - pelaksanaan kegiatan kelitbangan di sub bidang pemerintahan;
 - penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan sub bidang pemerintahan;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di sub bidang pemerintahan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan sub bidang Pengkajian Peraturan dan evaluasi kebijakan dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan mempunyai fungsi :
- pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;

- pelaksanaan kegiatan kelitbangan di sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
- penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
- penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Bidang Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengatur pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan penguatan kelembagaan, koordinasi, konsultasi dan evaluasi di Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengaturan untuk penyiapan bahan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- b. pengaturan pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. pelaksanaan evaluasi kegiatan kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. pelaksanaan penyeliaan penyusunan rekomendasi hasil kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- e. pelaksanaan penyeliaan administrasi dan tata usaha di Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai kewenangannya.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

- Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Subbidang Ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, keuangan daerah, pariwisata dan ekonomi kreatif, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan badan usaha milik daerah. Untuk melaksanakan tugas, Subbidang Ekonomi mempunyai fungsi :
 - mengumpul/mengolah data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi, serta konsultasi di sub bidang Ekonomi;
 - pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Ekonomi;
 - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Subbidang Ekonomi;
 - penyiapan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di sub bidang Ekonomi;
 - membimbing bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di sub bidang Ekonomi ; dan
 - melakukan tugas lain yang diberikan atasan.
- Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan dan penguatan kelembagaan, evaluasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan, koordinasi, konsultasi dan perumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi aspek-aspek ketahanan pangan, pertanian, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan bencana alam. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- Mengumpul/mengolah data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi, serta konsultasi di Penyusunan data dan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - penyusunan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - penyusunan data dan bahan serta fasilitasi kegiatan penguatan kelembagaan Sumber Daya Genetik;
 - membimbing bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - melakukan tugas lain yang diberikan atasan.
- Sub Bidang Sarana Prasarana, Fisik dan Wilayah, mempunyai tugas melakukan penyusunan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan, evaluasi, serta penyusunan bahan-bahan laporan, koordinasi, konsultasi dan perumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di Subbidang sarana prasarana fisik dan wilayah, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan, kelistrikan, komunikasi/informatika. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah mempunyai fungsi :
- mengumpul/mengolah data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi serta konsultasi di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
 - pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;

- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
- penyiapan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
- membimbing bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BIDANG ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI (IPTEK) DAN KERJASAMA

Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi (Iptek) dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengatur pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi (Iptek) dan Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. penyiapan data dan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan, yang meliputi pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama
- c. penyiapan bahan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang Iptek dan kerjasama;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian/pengkajian, rekayasa di bidang iptek dan kerjasama;

- e. pelaksanaan sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis teknologi informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Bidang Iptek dan Kerjasama terdiri dari :

- Sub Bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas, sub bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi mempunyai fungsi :
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan penerapan teknologi;
 - penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan serta penerapan teknologi, meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - pembinaan dan pelaksanaan kelitbangan di subbidang pengembangan dan penerapan teknologi meliputi; aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan fasilitas di subbidang pengembangan dan penerapan teknologi meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di subbidang pengembangan dan penerapan teknologi meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub bidang Kerjasama, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,fasilitasi, evaluasi, perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) serta pelaksanaan kerjasama kelitbangan. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Kerjasama mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sub bidang kerjasama meliputi semua aspek kelitbangan;
 - pemfasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang kerjasama meliputi semua aspek kelitbangan;
 - pembinaan, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kerjasama meliputi semua aspek kelitbangan;
 - penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas di bidang kerjasama meliputi semua aspek kelitbangan;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di bidang kerjasama meliputi semua aspek kelitbangan;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub bidang Diseminasi dan Publikasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan-bahan sosialisasi, promosi iptek ,diseminasi, dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Diseminasi dan Publikasi mempunyai fungsi :
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sub bidang Diseminasi dan publikasi meliputi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
 - pemfasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Diseminasi dan Publikasi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil

kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;

- pelaksanaan sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi ;
- pelaksanaan pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
- penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas di bidang Diseminasi dan Publikasi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
- penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di bidang Diseminasi dan Publikasi meliputi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BIDANG INOVASI DAERAH

Bidang Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Inovasi Daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan, strategi dan penerapan pengembangan memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;

- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- d. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Inovasi Daerah terdiri dari :

- Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat inovatif. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Inovasi Pelayanan Publik mempunyai fungsi :
 - menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat Inovatif; pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, mempunyai tugas bahan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur, dan metode tata kelola pemerintahan daerah yang bersifat inovatif. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan mempunyai fungsi :
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Tata Kelola Pemerintahan;
 - memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
 - menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersifat Inovatif; pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
 - melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
 - menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Sub Bidang Inovasi Produk Daerah, mempunyai tugas bahan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur dan metode pengembangan Produk Daerah yang bersifat inovatif. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Inovasi Produk Daerah mempunyai fungsi :
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Produk Daerah;
 - memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Produk Daerah;

- menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode pengembangan produk daerah yang bersifat Inovatif; pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Produk Daerah;
- melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Produk Daerah;
- menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Produk Daerah; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing;
2. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala badan;
3. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; dan
4. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balitbangda Provinsi Jambi memiliki 2 (dua) Jabatan Fungsional, yaitu :

a. Jabatan Fungsional Peneliti

Sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Keputusan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti, Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu

pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah. Pejabat Fungsional Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.

Tugas Jabatan Fungsional Peneliti melakukan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

b. Arsiparis

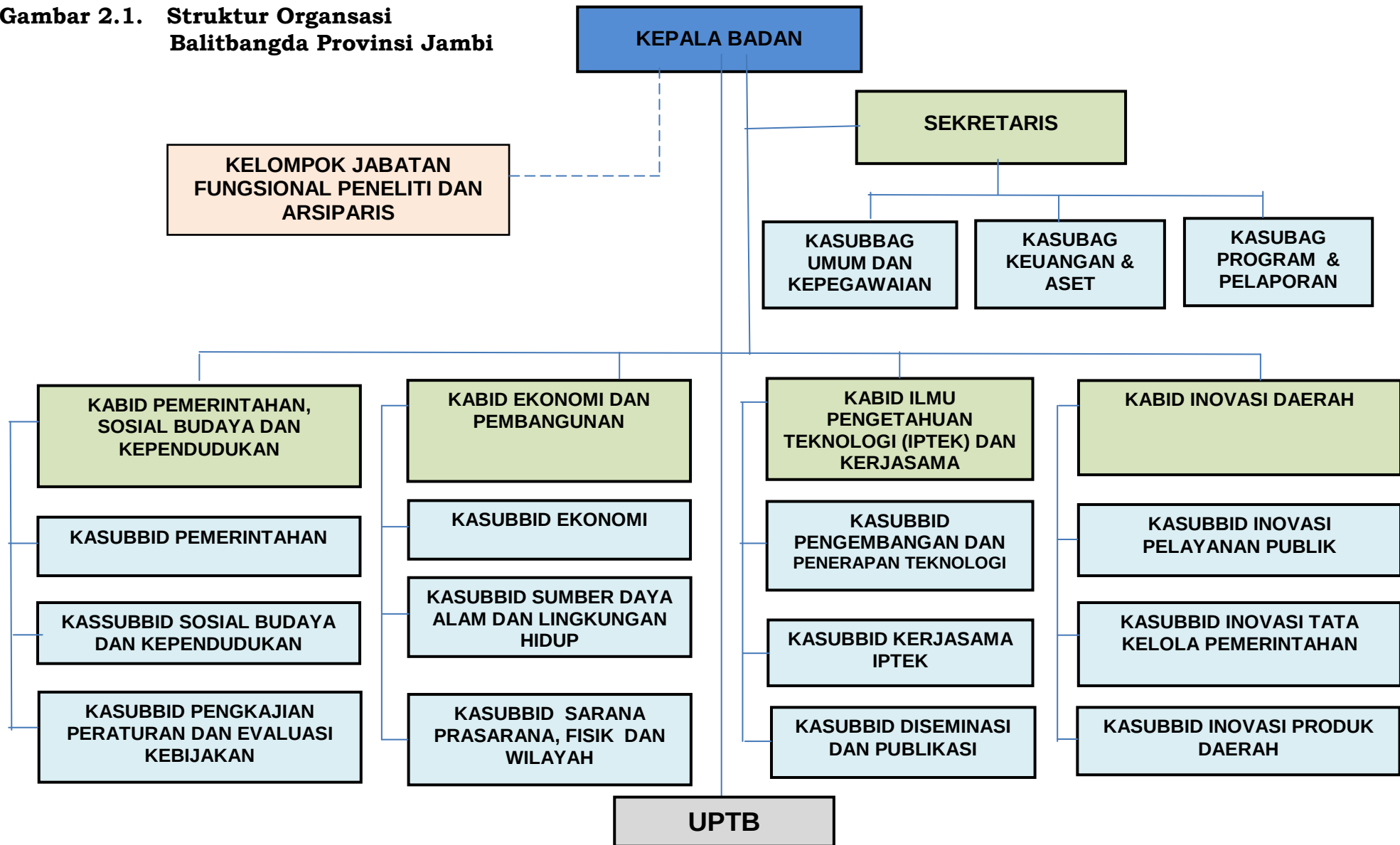
Sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Keputusan Ketua Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis, Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan Perguruan Tinggi Negeri. Pejabat Fungsional Arsiparis adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan Perguruan Tinggi Negeri.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Jambi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, dengan susunan terdiri dari 1 orang pejabat eselon II (Kepala Badan), 4 pejabat eselon III (1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang) dan 15 pejabat eselon I (3 Kasubbag dan 12 Kasubbid) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar berikut :

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi
Balitbangda Provinsi Jambi**



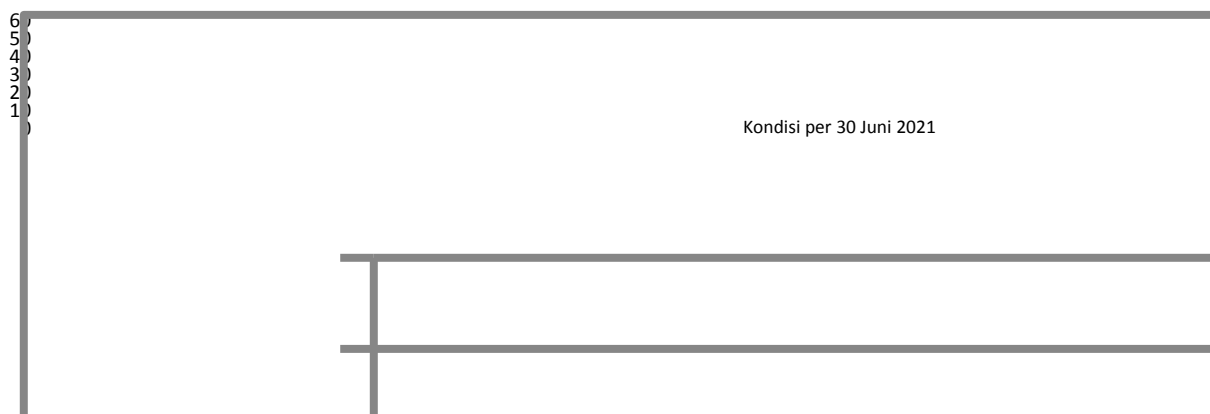
2.2. SUMBER DAYA

a. Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Balitbangda Provinsi Jambi, yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Balitbangda Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2021, tercatat sebanyak 50 (lima puluh) Pegawai Negeri Sipil yang terdiri 19 (sembilan belas) pejabat struktural, 6 (enam) pejabat fungsional peneliti, 1 (satu) pejabat arsiparis dan 24 (dua puluh empat) pejabat fungsional umum serta 12 (dua belas) non-PNS.

Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi disajikan dalam Grafik berikut :

Gambar 2.2. Grafik Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Pejabat truktural per 30 Juni Tahun 2021

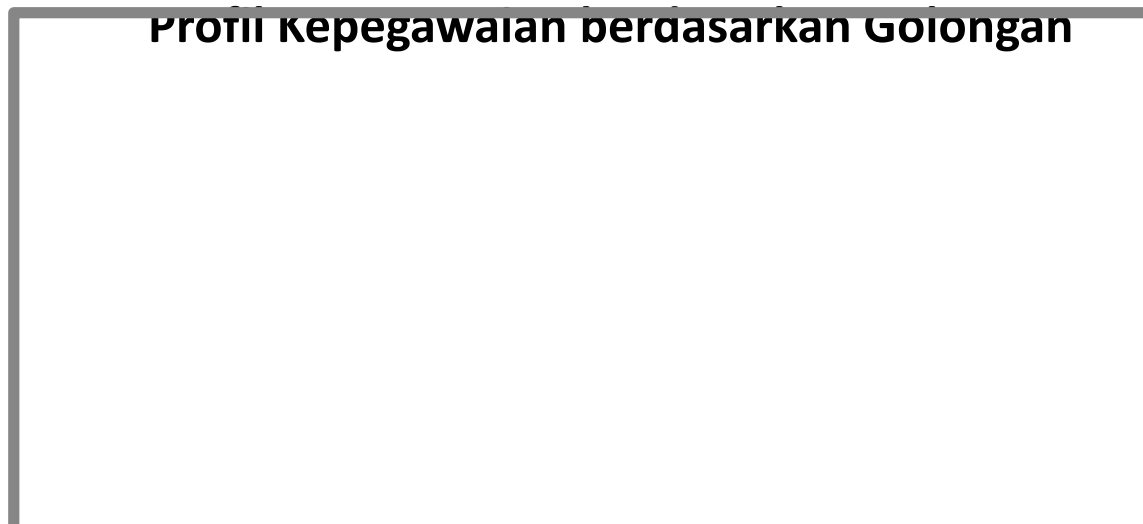


Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Balitbangda Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional tertentu dimana sebagian besar pegawai masih menduduki jabatan fungsional umum. Penambahan jabatan fungsional

peneliti sangat diperlukan agar dapat memberikan kinerja Balitbangda Provinsi Jambi secara maksimal.

Gambar 2.3. Grafik Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan per 30 Juni Tahun 2021

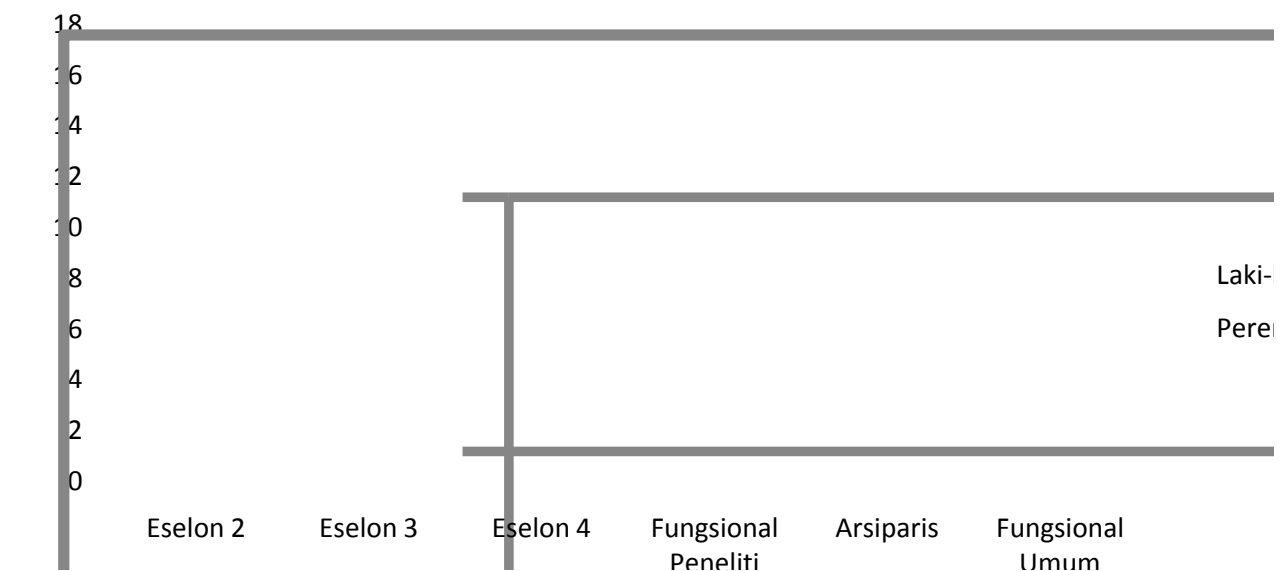


Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa pegawai di Balitbangda Provinsi Jambi sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.

Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Balitbangda Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.4. Grafik Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin per 30 Juni Tahun 2021

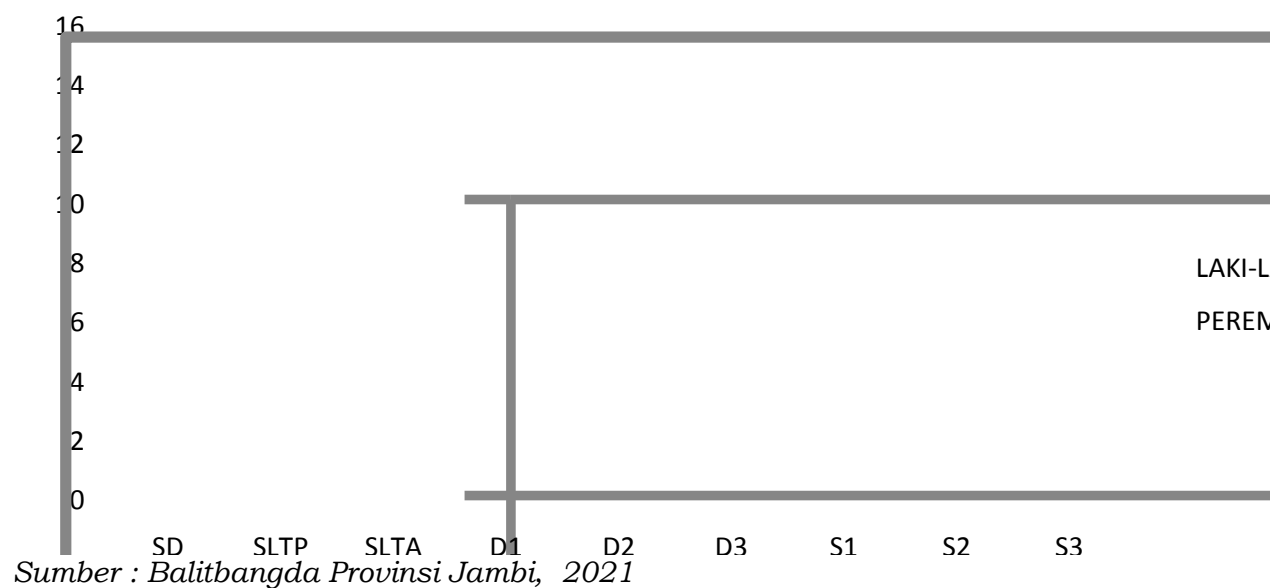


Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Balitbangda Provinsi Jambi sudah mencerminkan keseimbangan gender, dimana jumlah pegawai laki-laki dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya lebih banyak perempuan.

Profil kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi dasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.5. Diagram Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 30 Juni Tahun 2021



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Balitbangda Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 dan Sarjana S2.

b. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruangrapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Balitbangda Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Balitbangda Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1. Daftar Sarana dan Prasarana
Balitbangda Provinsi Jambi per 30 Juni Tahun 2021**

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Alat-alat besar	-	
2	Alat-alat angkutan	26 Unit	
	- Kendaraan Roda 4	10 Unit	Baik
	- Kendaraan Roda 2	16 Unit	2 Rusak Berat
3	Alat kantor dan rumah tangga	1.075 Jenis	20 Rusak Berat
4	Alat studio dan alat komunikasi	18 Jenis	1 Rusak Berat
5	Bangunan gedung	1 Unit	Baik
6	Jaringan	-	-
7	Buku perpustakaan	-	-
8	Alat-alat Kesehatan	2 jenis	Baik

Sumber : Balitbangda Daerah Provinsi Jambi, 2021

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Balitbangda Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN

a. Capaian Kinerja Berdasarkan Target

Di bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi pada periode renstra sebelumnya (2016-2021). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra

Balitbang pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama.

Kegiatan yang telah dilakukan Balitbangda Provinsi Jambi pada periode Renstra sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase rekomendasi/ naskah akademik/ model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>				30%	50%	50%	60%	60%	30%	50%	50%	60%	14,3 %	100	100	100	100	23,82
2	Persentase Peningkatan SIDA				80%	80%	80%	80%	100 %	80%	80%	80%	80%	0	100	100	100	100	0
3	Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan				0%	0%	0%	75%	75%	0%	0%	0%	75%	0	0	0	0	100	0
4	Science Park yang dikembangkan				1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	100	100
5	Persentase publikasi hasil- hasl kelitbangan yang dapat diakses masyarakat				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100

1. Capaian indikator Kinerja Persentase rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan Stakeholder

a. Tahun 2016 persentase rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan Stakeholder dengan target 30 % tercapai 30%. Penelitian yang dilaksanakan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) penelitian, yang terdiri dari :

❖ 9 (sembilan) penelitian mandiri untuk isu-isu aktual yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing fungsional peneliti yang ada di Ballitbangda Provinsi Jambi, dengan judul sebagai berikut :

- ✓ Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Jambi
- ✓ Efektifitas Program Dana Desa Dalam Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Muaro Jambi
- ✓ Model Kemitraan Budi Daya Ikan Air Tawar di Kabupaten Muaro Jambi
- ✓ Kajian Pemasaran dan Daya Saing Pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- ✓ Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, Efektifitas dan Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tebo
- ✓ Pengembangan Cerita Rakyat Kambi sebagai Bahan Ajar Muatan Lokal Bagi Sekolah Dasar
- ✓ Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- ✓ Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Jambi
- ✓ Sinergitas antar Unsur dan Lembaga pada Pemerintahan Desa

❖ 2 (dua) penelitian analisis kebijakan secara antisipatif dan responsif dengan judul :

- ✓ Kajian Strategis Pengentasan Kerawanan Pangan di Provinsi Jambi
- ✓ Kajian Strategis Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Provinsi Jambi

❖ 8 (delapan) penelitian yang dilakukan oleh bidang-bidang dengan judul sebagai berikut :

- ✓ Penelitian Kinerja Puskesmas dalam Implementasi BPJS di Provinsi Jambi.
- ✓ Penelitian Pola Hubungan Lintas Bidang dalam Pembangunan Perdesaaan di Provinsi Jambi
- ✓ Penelitian Potensi Energi Baru dan Terbarukan Di Provinsi Jambi.
- ✓ Penelitian Potensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Provinsi Jambi
- ✓ Penelitian Pengembangan Daya Saing Produk Lokal di Provinsi Jambi
- ✓ Penelitian Pengembangan Industri Kreatif di Provinsi Jambi.
- ✓ Kajian Kepuasan Nasabah terhadap Pelayanan Bank Jambi di Provinsi Jambi.
- ✓ Penerapan Inovasi Teknologi Pengolahan Zat Pewarna Batik Alam Jambi.

b. Tahun 2017 persentase rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan Stakeholder dengan target 50 % tercapai 50%. Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2017 ada 34 (tiga puluh empat) penelitian yang terdiri dari :

❖ 10 (sepuluh) penelitian mandiri untuk isu-isu aktual yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing fungsional peneliti yang ada di Ballitbangda Provinsi Jambi, dengan judul sebagai berikut :

- ✓ Kajian Perkembangan Luas Lahan Pertanian dan Jumlah Penduduk Di Provinsi Jambi
- ✓ Strategi Pengembangan Pertanian Kota Berkelanjutan Di Provinsi Jambi
- ✓ Persepsi Aparatur Sipil Negara Mengenai Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional Di Provinsi Jambi
- ✓ Budaya Kerja Dan Kinerja PNS Provinsi Jambi Ditinjau Dari *Big Five Personality* dan Budaya Organisasi
- ✓ Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Serapan Tenaga Kerja lulusan SMK Di Provinsi Jambi Dengan *Metode Delphy*

- ✓ Pola Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang
- ✓ Penerapan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Pengrajin Batik Di Provinsi Jambi
- ✓ Kerjasama Multi Pihak Dalam program Pembangunan PLTMH Di provinsi Jambi ditinjau dari Perspektif *Collaborative Governance*
- ✓ Peranan Niniek Mamak Dalam Pemerintahan Adat Di desa Tanjung Pauh Mudik Kabupaten Kerinci
- ✓ Faktor Yang Berpengaruh Pada Kepuasan Kerja Petugas Puskesmas Di Kabupaten Merangin
- ❖ 1 (satu) penelitian analisis kebijakan secara antisipatif dan responsif dengan judul Kajian Klasterisasi Industri Hilir Produk Olahan Berbahan Baku Karet Di Provinsi Jambi
- ❖ 12 (dua belas) penelitian yang dilakukan oleh bidang-bidang dengan judul sebagai berikut :
 - ✓ Kajian Pelayanan Pemerintah Kab/Kota Terhadap Masyarakat Di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.
 - ✓ Kajian Pengembangan Desa Inovasi Dan Mandiri Dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan Di Provinsi Jambi.
 - ✓ Kajian Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - ✓ Penelitian Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Anemia Pada Remaja Putri dan Program Penanggulangannya di Provinsi Jambi.
 - ✓ Penelitian Peningkatan Kualitas dan Mutu Pendidikan Serta Tenaga Pendidik Di Provinsi Jambi. Penelitian Kualitas Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja di Provinsi Jambi.
 - ✓ Penelitian Pembentukan Karakter Anak Menuju Generasi Muda Berkualitas di Provinsi Jambi.
 - ✓ Kajian Potensi dan Peningkatan Mutu Komoditi Unggulan Provinsi Jambi.
 - ✓ Kajian Peningkatan Status PT. PLN (Persero) Area Jambi Menjadi PT. PLN (Persero) Jambi.

- ✓ Penelitian Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Provinsi Jambi (Kajian Reklamasi Bekas Galian Tambang Batubara Sebagai Lokasi Wisata di Kabupaten Bungo).
 - ✓ Penelitian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ketahanan Pangan (Strategi Pengembangan Distribusi Beras Lokal Berlabel Di Provinsi Jambi).
 - ✓ Kajian dan Evaluasi Kualitas Bibit Sawit Di Provinsi Jambi.
- c. Tahun 2018 mencapai 50% atau 100% tercapai dari target yang telah ditentukan.
- Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2018 ada 34 (tiga puluh empat) penelitian yang terdiri dari :
- ❖ 9 (sembilan) penelitian mandiri untuk isu-isu aktual yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing fungsional peneliti yang ada di Balitbangda Provinsi Jambi, dengan judul sebagai berikut :
 - ✓ Efektivitas Implementasi Pengelolaan Lingkungan Pabrik Kelapa Sawit Menuju Sustainable Development Goals di Kabupaten Batanghari
 - ✓ Skenario Kebijakan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Batanghari (Alternatif Strategi Penataan Kawasan Orang Kayo Hitam Muaro Bulian)
 - ✓ Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara Online di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi (Studi di Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Jambi dan Desa Kampung Pulau Kecamatan Pamayung)
 - ✓ Keputusan Petani Berusaha Tani Jagung dengan menerapkan Teknologi Budidaya Jenuh Air (Studi kasus di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjab Timur)
 - ✓ Kajian Implementasi Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Jambi
 - ✓ Pengaruh Pinjaman Usaha Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil (Studi kasus pada BAZNAS Provinsi Jambi)

- ✓ Model Pemberdayaan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- ✓ Kinerja Pendamping Desa Dalam Pengawasan Dana Desa
- ✓ Kajian Komoditas Unggulan Subsektor Perkebunan di Kabupaten Muaro Jambi
- ❖ 1 (satu) penelitian analisis kebijakan secara antisipatif dan responsif dengan judul Analisis Pemasaran dan Branding Produk Makanan Jambi Menjadi Produk Makanan Nasional
- ❖ 9 (sembilan) penelitian yang dilakukan oleh bidang-bidang dengan judul sebagai berikut :
 - ✓ *Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Jambi*
 - ✓ *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Model Penerimaan Teknologi Aplikasi SISKEUDES di Provinsi Jambi)*
 - ✓ *Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Raden Mattaher Jambi dan RSUD H. Hanafie Muaro Jambi*
 - ✓ *Strategi Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) Dalam Menghadapi Bonus Demografi di Provinsi Jambi*
 - ✓ *Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Lanjut Usia di Provinsi Jambi, Kajian Pelayanan Pemerintah Kab/Kota Terhadap Masyarakat Di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.*
 - ✓ *Pengembangan SMK Berbasis Potensi Unggulan Daerah di Provinsi Jambi*
 - ✓ *Pengembangan dan Pengelolaan Jalan Pertanian Berkelanjutan di Provinsi Jambi,*
 - ✓ *Pengendalian Aktifitas PETI dan Pengembangan Inovasi Penataan Lahan Eks PETI*
 - ✓ *Model Inovasi Produk Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Melalui Pendekatan Community Based Tourism di Provinsi Jambi*
- d. Target pada tahun 2019 sebesar 60% dengan capaian sebesar 60%. Adapun Penelitian yang dilaksanakan sebagai berikut :

- ❖ Program Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - ✓ Kegiatan Penelitian Sub Bidang Pemerintahan Desa dengan judul penelitian “Evaluasi Program Bantuan Keuangan Provinsi Terhadap Kebutuhan Pembangunan Pedesaan Di Provinsi Jambi”.
 - ✓ Kegiatan Penelitian Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan judul penelitian “*Determinan Stunting dan Model Pengendaliannya Di Provinsi Jambi (Studi Kasus pada Wilayah Dengan Prevalensi Kategori Berat)*”.
- ❖ Program Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Sosial dan Kependudukan
 - ✓ Kegiatan Penelitian Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan judul “*Pengurangan Ketimpangan Pendapatan, Pendidikan dan Kesehatan Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi*”.
 - ✓ Kegiatan Penelitian Sub Bidang Kependudukan dengan judul “*Determinan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Jambi*”.
 - ✓ Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Sosial Budaya adalah dengan judul “*Persistensi Pengangguran Terdidik dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Jambi*”.
- ❖ Program Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - ✓ Kegiatan Pengembangan Sub Bidang Ekonomi dengan judul kegiatan “Pengembangan Model Inovasi Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Melalui Institusi Multipihak”.
 - ✓ Kegiatan Penelitian Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana dengan judul “Penelitian Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pengadaan Alat Berat dan Alat Pendukung Lainnya Di Kecamatan Dalam Provinsi Jambi
- ❖ 2 (dua) penelitian mandiri untuk isu-isu aktual yang dilakukan secara mandiri, dengan judul sebagai berikut :
 - ✓ Kajian Pengembangan dan Investasi Agroindustri Kopi di Kabupaten Kerinci

- ✓ Diversifikasi Usahatani Kelapa Dalam untuk Meningkatkan Pendapatan Petani dan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - ❖ 1 (satu) penelitian analisis kebijakan secara antisipatif dan responsif dengan judul Optimalisasi Potensi Retribusi Jasa Usaha Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jambi
- e. Tahun 2020 realisasi hanya 14,3% dari target 60%, namun karena keterlambatan Pengukuhan Nomenklatur Balitbangda yang baru dan musibah pandemi Covid-19 maka terjadi refocusing anggaran yang mengakibatkan penghapusan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di bidang-bidang. Hampir semua kegiatan Penelitian dan Pengembangan dihapus yang masih berjalan hanya kegiatan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Ekonomi, dengan judul *“Kajian Kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi dalam Percepatan Penanganan Covid-19 secara Komprehensif”*.

2. Capaian indikator Kinerja Persentase Peningkatan SIDA

Pembangunan daerah perlu adanya peningkatan daya saing antar daerah sebagai agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini inovasi dan pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadi kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Terutama kolaborasi antara akademisi, swasta dan pemerintah. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam Sistem Inovasi Nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi.

- a. Tahun 2016 Persentase Peningkatan SIDA dengan target 80 % tercapai 80%.
- b. Tahun 2017 Persentase Peningkatan SIDA dengan target 80 % tercapai 80%.

Balitbangda Provinsi Jambi dalam rangka penguatan dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) tahun 2017 yaitu melaksanakan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengolahan kopi yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari tanggal 9 Mei

2017 bertempat di Koperasi Tani Kayo Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh, dengan peserta yang berasal dari Balitbangda Kota Sungai Penuh, Dinas Perkebunan Kota Sungai Penuh, Dinas Perdagangan Kota Sungai Penuh, Dinas Pertanian Kota Sungai Penuh, Dinas Koperasi UMKM Kota Sungai Penuh, Penyuluh Pertanian Kota Sungai Penuh, Pengurus Koperasi Kayo Kota Sungai Penuh dan Petani Kopi Se-Kota Sungai Penuh. Pelatihan Penguatan dan Pengembangan SIDA yang difokuskan pada Hilirisasi produk olahan kopi adalah untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang cara pengolahan dan pasca panen kopi dengan campuran kayu manis serta pemasaran hasil industri petani kopi. Sedangkan tujuannya adalah untuk peningkatan pendapatan petani kopi ke-depan dapat mengolah kopi dengan sebaik-baiknya mulai dari hulu sampai hilir dan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan petani kopi.

- c. Tahun 2018 tercapai 80% atau 100% dari target yang telah ditentukan.

Balitbangda Provinsi Jambi dalam rangka penguatan dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) tahun 2018 yaitu melaksanakan workshop sistem inovasi daerah dengan maksud memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengembangan sistem inovasi daerah, inovasi produk, jejaringan pemasaran, promosi dan networking. Tujuan dilaksanakan workshop adalah untuk meningkatkan kerjasama antar pemerintah, Perguruan Tinggi dan UKM serta mendorong pengembangan produk yang berdaya saing. Workshop Sistem Inovasi Daerah mengambil tema Dengan SIDA Kita Dorong Pengembangan Produk Unggulan Daerah Yang Berdaya Saing Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

- d. Tahun 2019 sebesar 80% dengan capaian sebesar 80%.

Kegiatan yang dilaksanakan penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan komoditi Nanas Tangkit dan Pinang. Penyusunan Roadmap bertujuan sebagai arah kebijakan Provinsi Jambi untuk mewujudkan “Masyarakat Sejahtera” dalam mendukung Pembangunan dan pengembangan ekonomi lokal yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri, mewujudkan masyarakat yang

berkemampuan dan berdaya saing yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat

e. Sementara tahun 2020 realisasi hanya 0% dari target 100%

Untuk indikator kinerja peningkatan SIDA diwujudkan dengan Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dengan dilaksanakannya workshop/pelatihan sistem inovasi daerah dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengembangan sistem inovasi daerah, inovasi produk, jejaringan pemasaran, promosi dan *networking*. Namun karena keterlambatan Pengukuhan Nomenklatur Balitbangda yang baru dan musibah pandemi Covid-19 maka terjadi refocusing anggaran yang mengakibatkan penghapusan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sub bidang Inovasi Produk Daerah.

3. Capaian indikator Kinerja Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan

Indikator Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan merupakan indikator kinerja Balitbangda setelah ada perubahan indikator kinerja pada tahun 2019 sehingga Tahun 2016 s.d. 2018 Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan tidak ada. Target pada tahun 2019 sebesar 75% dengan capaian sebesar 75%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Lomba Inovasi Daerah pada OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dengan menghitung Skor dari setiap isian data dukung inovasi daerah yang diinput oleh OPD melalui Aplikasi SIJAGOAN. Untuk OPD pemenang lomba tersebut diberikan insentif dan piagam penghargaan serta piala oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk Tahun 2019 lomba Inovasi daerah merupakan lomba yang pertama kali dilaksanakan dengan maksud untuk menggugah dan mendorong kepada semua OPD agar melakukan terobosan dalam berinovasi khususnya dalam melayani masyarakat. Sementara tahun 2020 realisasi hanya 0% dari target 75% hal ini disebabkan pada tahun tersebut terjadi pandemi covid-19 sehingga adanya refocusing anggaran yang mengakibatkan berkurangnya anggaran dan juga adanya keterlambatan pengukuhan nomenklatur baru Balitbangda Provinsi Jambi

4. Capaian indikator Kinerja Science Park yang dikembangkan

Tahun 2016 Kinerja Science Park yang dikembangkan dengan target 1 tercapai masih 0 karena kegiatan Science Park yang dikembangkan baru menyusun *Master Plan* pembangunan *Science Park* Provinsi pada lahan seluas 25.723.914 Ha yang terletak di kawasan Bumi Perkemahan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Tahun 2017 Kinerja Science Park yang dikembangkan dengan target 1 tercapai masih 0, tahun 2017 diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 835.KEP.GUB/SET.PBMD.2.3/2017 tentang Penetapan status penggunaan tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi yang terletak di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungaim Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 9,7 Ha. Tahun 2018 tercapai 1 atau 100% dari target yang telah ditentukan. Tahun 2018 telah dilaksanakan pemasangan Papan Merk dan memasang patok yang telah ditetapkan agar lokasi pembangunan *Science Park* dapat terpelihara dan berkembang lebih baik. Tahun 2019 dengan capaian sebesar 100% dengan kegiatan pembersihan lahan (tebang tebas) tahap I *Science Park* Provinsi Jambi. Sementara tahun 2020 karena keterlambatan Pengukuhan Nomenklatur Balitbangda yang baru dan musibah pandemi Covid-19 maka terjadi refocusing anggaran yang mengakibatkan penghapusan kegiatan Science Park di Provinsi Jambi sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam *Pengembangan Kawasan Science Park* adalah : 1. Tebatasnya dana, dimana untuk pembangunan kawasan *Science Park* ini sangat membutuhkan dana yang besar; dan 2. Belum adanya kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya yang ada di Provinsi Jambi.

5. Capaian indikator Kinerja Persentase Publikasi Hasil-Hasil Kelitbangan yang dapat diakses Masyarakat

- a. Tahun 2016 persentase Persentase publikasi hasil-hasil kelitbangan yang dapat diakses masyarakat dengan target 100 % tercapai 100%.

- b. Tahun 2017 persentase Persentase publikasi hasil-hasil kelitbang yang dapat diakses masyarakat dengan target 100% tercapai 100%. Penerbitan Jurnal Litbang pada Balitbangda Provinsi Jambi terbit setiap 4 (empat) bulan sekali selama 1 (satu) tahun dan disebarluaskan kepada Bappeda, balitbangda Kab/Kota, Perguruan Tinggi, Perpustakaan dan Pihak terkait lainnya. Jurnal Litbang (Jurnal Khazanah Intelektual) yang diterbitkan Balitbangda Provinsi Jambi tersebut disamping sebagai wahana sosialisasi hasil-hasil kajian juga untuk memperoleh kredit point bagi penulis/tenaga fungsional baik di lingkungan Balitbangda maupun dari luar Balitbangda. Jurnal tersebut pada tahun 2018 diharapkan sudah bisa menggunakan system OJS (Operational Journal System) sehingga dapat mengakomodir para penulis ilmiah dari berbagai provinsi/kabupaten/kota.
- c. Tahun 2018 mencapai 100% atau 100% tercapai dari target yang telah ditentukan. Penerbitan Jurnal Litbang pada Balitbangda Provinsi Jambi terbit setiap 4 (empat) bulan sekali selama 1 (satu) tahun dan tahun 2018 Jurnal sudah uji coba menggunakan system *Operational Journal System* (OJS).
- d. Target pada tahun 2019 sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Penerbitan Jurnal Litbang pada Balitbangda Provinsi Jambi terbit setiap 4 (empat) bulan sekali selama 1 (satu) tahun dan tahun 2019 Jurnal sudah menggunakan system *Operational Journal System* (OJS).
- e. Tahun 2020 realisasi 100% dari target 100%. Penerbitan Jurnal Litbang pada Balitbangda Provinsi Jambi terbit setiap 4 (empat) bulan sekali selama 1 (satu) tahun dan sudah menggunakan system *Operational Journal System* (OJS) dan mempersiapkan jurnal Khazanah Balitbangda masuk Sinta 2.

b. Capaian Kinerja Keuangan

Capaian Kinerja Keuangan dari segi Anggaran trendnya menurun seperti yang tergambar pada tabel 2.3 di bawah ini. Dilihat dari anggaran mengalami penurunan tahun 2017 dan 2018 dibandingkan tahun 2016. Tahun 2019 anggaran mengalami kenaikan dan menurun lagi di Tahun 2020, hal ini disebabkan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, sehingga anggaran

dilakukan refocusing untuk dana Covid-19. Capaian Kinerja Keuangan dari segi Realisasi Anggaran trendnya mengalami kenaikan, ini dapat dilihat dari rasio realisasi anggaran seperti yang tergambar pada table 2.3.

Rata-rata realisasi rasio realisasi kurang dari 100%. Tahun 2016 program yang realisasi anggaran terbesar adalah program Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar 98,51% dan rasio reasiasi anggaran terendah adalah program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki rasio sebesar 40,73%. Tahun 2017 program yang realisasi anggaran terbesar adalah program Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Laporan Keuangan sebesar 99,95% dan rasio reasiasi anggaran terendah adalah program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki rasio sebesar 90,83%. Tahun 2018 program yang realisasi anggaran terbesar adalah program Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar 99,17% dan rasio reasiasi anggaran terendah adalah program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Laporan Keuangan memiliki rasio sebesar 64,43%. Tahun 2019 program yang realisasi anggaran terbesar adalah program Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah sebesar 99,26% dan rasio reasiasi anggaran terendah adalah program Peningkatan Disiplin Aparatur memiliki rasio sebesar 93,75%. Tahun 2020 program yang realisasi anggaran terbesar adalah program Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Laporan Keuangan sebesar 100% serta rasio reasiasi anggaran terendah adalah program Penelitian dan Pengembangan memiliki rasio sebesar 93,02%.

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Balitbangda Provinsi Jambi

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuh- an	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angg aran	Real
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	819.209.720	845.928.400	828.784.300	810.379.800	891.952.147	757.949.559	789.140.757	808.472.439	798.745.044	868.457.827	92,52	93,29	97,55	98,56	97,37	2.27	3.52
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	665.696.780	404.038.000	433.780.000	412.239.200	1.005.166.326	556.531.210	386.937.560	420.154.457	401.407.700	979.276.615	83,60	95,77	96,86	97,37	97,42	26.73	29.40
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	26.800.000	45.000.000	45.000.000	52.000.000	46.150.000	26.400.000	43.875.000	44.625.000	48.750.000	46.150.000	98,51	97,50	99,17	93,75	100	18.05	17.95
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	65.000.000	42.000.000	49.090.000	55.760.000	21.522.800	26.472.000	38.150.000	48.085.055	54.071.200	2.800	40,73	90,83	97,95	96,97	100	-16.58	5.60
Program Peningkatan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	0	50.080.500	18.081.000	6.600.000	0	0	50.053.000	11.650.000	6.420.000	0	#DIV/0!	99,95	64,43	97,27	#DIV/0!	-75.80	-73.87
Program Penelitian dan Pengembangan	1.616.885.100	2.191.719.256	1.736.490.750	1.992.654.650	537.208.000	1.524.133.959	2.046.917.608	1.673.985.148	1.945.673.243	499.721.000	94,26	93,39	96,40	97,64	93,02	-10.88	-10.50

Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	1.435.980.400	1.335.242.550	843.735.450	1.092.078.350	575.141.797	1.380.227.443	1.286.402.818	805.268.109	1.078.896.611	568.190.619	96,12	96,34	95,44	98,79	98,79	-15.43	-14.39
Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	835.223.000	228.308.249	582.107.500	578.288.000	81.829.000	658.328.350	218.455.325	573.508.174	574.644.250	81.225.200	78,82	95,68	98,52	99,37	99,26	-1.05	2.51
TOTAL	5.464.795.000	5.069.208.955	4.537.069.000	5.000.000.000	3.158.970.070	4.930.042.521	4.859.932.068	4.385.748.382	4.908.608.048	3.064.544.061	90,21	95,87	96,66	98,17	97,01	-11.09	-9.21

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan yang dilakukan Balitbangda Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jambi yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi keenangan daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tujuan utama pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan data yang akurat dan terkini sehingga perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan Penelitian dan Pengembangan Daerah dihadapkan dengan beberapa tantangan internal maupun eksternal dalam pengembangan pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi, yaitu :

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah;
2. Sumberdaya aparatur yang belum memadai secara kuantitas dan kualitas.

SDM di Balitbangda beranggapan Balitbangda sebagai batu loncatan/mencari peluang untuk memperoleh bantuan tugas belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan beralih ke jabatan struktural serta penempatan SDM belum sesuai dengan prinsip *The Right Man In The Right Place*. Serta terbatasnya jumlah pejabat fungsional peneliti sesuai dengan kepakaran yang dibutuhkan.

3. Belum terkoordinasinya, sinkronisasi dan terintegrasinya program-program kelitbangan antar perangkat daerah dan antar kelitbangan yang ada di Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota dan Kabupaten.
4. Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Daya Saing Daerah Menghadapi dinamika perubahan yang cepat dan semakin kompleks, upaya peningkatan daya saing sangat bertumpu pada kemampuan berinovasi berbagai pihak pada berbagai dimensi dan tataran. Oleh karena itu, upaya peningkatan daya saing perlu semakin diprioritaskan melalui penguatan sistem inovasi. Rendahnya budaya Inovasi dikalangan masyarakat dan akademisi menjadi satu tantangan tersendiri bagi Provinsi Jambi dalam pengembangan pelayanan penelitian dan pengembangan.
5. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam.

Keterbukaan telah mendorong masyarakat untuk berpikir kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Tuntutan masyarakat akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) memaksa penyelenggara pemerintahan untuk semakin mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan serta kemasyarakatan. Sikap kritis masyarakat tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan. Selain itu, tantangan yang berat dimana saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin lemah terutama dalam penegakan hak asasi manusia, lingkungan hidup, penegakan hukum, pelayanan publik dan pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

6. Belum optimalnya pengelolaan hasil-hasil kelitbangan
Pengelolaan hasil-hasil kelitbangan perlu dikelola dengan baik sebagai data base yang terintergrasi dan menjadikan Balitbangda sebagai *resource center* atau bank data/informasi kelitbangan.

7. Peristiwa pandemi Covid-19 mengharuskan Balitbangda Provinsi Jambi agar lebih inovatif dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan guna menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan meningkatkan inovasi daerah.
8. Ilmu pengetahuan dan teknologi digitalisasi yang berkembang dengan pesat, sementara secara kelembagaan belum tersedia sumber daya yang memadai baik anggaran maupun sumber daya manusia.
9. Belum kuatnya kerjasama kelitbangan dengan institusi litbang lainnya baik institusi litbang pemerintah atau swasta, dan perguruan tinggi terutama baik di tingkat nasional ataupun internasional
10. Tuntutan *stakeholders* terhadap kualitas hasil kelitbangan semakin meningkat dan harapan *stakeholders* terhadap Balitbangda mulai tinggi.
11. Data dan Jaringan Inovasi

Data dan jaringan inovasi merupakan bagian yang berperan sentral dalam upaya penguatan inovasi. Dikatakan demikian karena tanpa adanya data inovasi, penyaluran pengetahuan dan pengukuran kinerja penguatan inovasi yang dilakukan tidak akan bisa berjalan dengan baik, pun tanpa adanya jaringan inovasi, kolaborasi antar aktor akan menjadi susah untuk terjadi. Data dan jaringan inovasi merupakan dua hal saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Data inovasi yang dikelola dengan baik dapat berperan dalam mendorong lahirnya *sharing* pengetahuan dan terbentuknya jaringan antar pelaku inovasi. Oleh karena itu, akan lebih efektif apabila pengelolaan keduanya dilakukan secara terintegrasi.

Peluang internal maupun eksternal dalam pengembangan pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi, yaitu :

1. Dukungan dari Pemerintah Provinsi dalam bentuk pengalokasian anggaran melalui APBD dan Balitbangda melaksanakan fungsi

penunjang di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. .

2. Adanya keinginan dan motivasi yang kuat dari segenap pimpinan dan pegawai Balitbangda Provinsi Jambi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab guna menjadikan litbang sebagai unit organisasi yang kredibel di bidangnya.
3. Tersedianya lembaga-lembaga Litbang (PTN/PTS, balai-balai penelitian, lembaga-lembaga peneliti/jasa konsultan lainnya) yang bisa menjadi mitra kerja kegiatan penelitian dan pengembangan.
4. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi dihadapkan pada berbagai permasalahan baik itu dibidang Pemerintahan, Politik, Kemasyarakatan, Kesehatan, Ekonomi dan Keuangan dll. Disatu sisi ini menjadi permasalahan bagi pemerintah, tapi disisi lain ini menjadi peluang bagi Balitbangda Provinsi Jambi untuk berkontribusi dan menjalankan fungsinya sebagai penelitian dan pengembangan untuk memberikan rekomendasi atau masukan kepada Pengambil Kebijakan terhadap permasalahan yang ada.
5. Berdasarkan posisi strategis, pada prinsipnya Balitbangda Provinsi Jambi berperan pada bidang formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian kegiatan Kelitbangan Daerah merupakan ujung tombak formulasi dan evaluasi serta indikator untuk pedoman bangunan dan pengembangan daerah. Optimalisasi program/kegiatan kebijakan pembangunan sangat ditentukan oleh intensitas koordinasi dan sinkronisasi antara OPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Mekanisme kerjasama ini menempatkan Balitbangda Provinsi Jambi sebagai koordinator, mediator dan fasilitator dalam kegiatan penelitian dan pengembangan serta memberikan rekomendasi arah kebijakan Pembangunan Daerah.
6. Kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan informasi sebagai sarana kemudahan akses terhadap data dan perkembangan media sosial sebagai sarana untuk mengkomunikasikan atau

mendiseminasikan hasil litbang, dan peningkatan jumlah pemanfaatan hasil litbang

7. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi, Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai landasan pembangunan berbasis inovasi.
8. Adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi di Daerah .

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BALITBANGDA

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Balitbangda Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi tersebut, maka peran Balitbangda Provinsi Jambi sangat penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan di Provinsi Jambi.

Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumber daya yang baik. Permasalahan utama yang dihadapi Balitbangda Provinsi Jambi untuk menjalankan tugas pokok tersebut adalah terbatasnya jumlah Peneliti dan kepakaran bidang-bidang penelitian yang dibutuhkan. Selain permasalahan terbatasnya SDM Peneliti ada beberapa hal yang menjadi permasalahan Balitbangda Provinsi Jambi, antara lain :

1. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya kemitraan/jejaring penelitian dan penerapan Iptek.
3. Belum optimalnya pemanfaatan ekosistem inovasi sebagai budaya baru di kalangan Pemerintah, Masyarakat, Akademisi dan Pelaku Usaha dalam upaya peningkatan kinerja inovasi di daerah.

4. Belum optimalnya implementasi Iptek bagi pembangunan di daerah.

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Salah satu acuan pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi.

Berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Misi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan ketentuan di atas, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT (MANTAP)”

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerinth Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang

lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman : terciptanya dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Jambi Nyaman : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatkan iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupam di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat

Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat plural.

Jambi Profesional: Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Misi pertama, yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas yang mana sasaran adalah : a. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan b. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima.

Misi kedua, yaitu : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah dengan tujuan memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditi unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau)

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana sasaran strategis yang dilakukan adalah : a. memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan; b. meningkatkan industri pengolahan; c. meningkatkan peran sektor pariwisata serta IKM pendukung pariwisata; d. memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar; e. Meningkatkan kualitas lingkungan; f. Menurunnya tingkat pengangguran; dan g. Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan.

Misi ketiga, yaitu : memantapkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya, agamis dan berkesetaraan gender yang mana sasaran strategis adalah : a. meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; b. meningkatnya akses terhadap pendidikan; c. meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya; d. meningkatnya toleransi intra dan antar agama; dan e. meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.

Dari Visi dan Misi Jambi MANTAP yang telah ditetapkan dimaksud, Balitbangda Provinsi Jambi sebagai OPD yang merupakan unsur penunjang, bertanggung jawab dalam pengkoordinasian proses penelitian dan pengembangan pembangunan daerah Provinsi Jambi, Balitbangda turut bertanggungjawab dalam mewujudkan ketiga misi pembangunan tersebut. Misi yang terkait dengan tupoksi Balitbangda Provinsi Jambi adalah Misi Kesatu yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.

Disamping itu, eksistensi Balitbangda sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya ketiga misi Gubernur.

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang baik tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya penelitian yang baik. Penelitian merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan. Inilah peran yang sangat strategis yang harus dilaksanakan oleh Balitbangda

Provinsi Jambi dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan seluruh pelaku pembangunan.

Permasalahan pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi beserta faktor penghambat dan pendorongnya atas pelaksanaan program pembangunan daerah dijelaskan pada tabel 3.1. di bawah ini :

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT (MANTAP)				
Misi Pertama : Memantapkan Tatakelola Pemerintahan				
Program :				
1.	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	- Hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah Balitbangda dengan nilai “B”.	a. Belum adanya pedoman penerapan SAKIP Perangkat Daerah yang disusun oleh Instansi terkait b. LKj Balitbangda Provinsi Jambi belum disajikan informatif dan baik sesuai ketentuan. c. LKj Balitbangda Provinsi Jambi belum sepenuhnya memberikan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja yang riil secara memadai serta belum menyajikan	a. Pemerintah Provinsi Jambi telah memiliki sistem manajemen aplikasi e-SAKIP yang memadai. b. Adanya pendampingan penyusunan LKj Perangkat Daerah

			perbandingan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya sesuai rentang Renstra. d. Penetapan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria yang baik (SMART). e. Pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum dilakukan secara periodik.	
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Proses penyusunan kebijakan masih belum didasarkan pada hasil-hasil penelitian dan pengembangan dengan kata lain Penelitian dan pengembangan belum dijadikan landasan/rekomendasi dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah	a. Terbatasnya kepakaran fungsional peneliti b. Penentuan tema penelitian yang kurang up date c. Masih terdapat ego sektoral pada masing-masing OPD yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar program	a. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi b. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi

				Jambi dihadapkan pada berbagai permasalahan baik itu dibidang Pemerintahan, Politik, Kemasayarakatan, Kesehatan, Ekonomi dan Keuangan dll. Disatu sisi ini menjadi permasalahan bagi pemerintah, tapi disisi lain ini menjadi peluang bagi Balitbangda untuk berkontribusi dan menjalankan fungsinya sebagai penelitian dan pengembangan untuk memberikan rekomendasi atau masukan kepada Pengambil Kebijakan terhadap permasalahan yang ada.
--	--	--	--	--

3		Belum optimalnya kolaborasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan PTN/PTS, Badan Litbang Pusat maupun Kab/Kota maupun OPD terkait	a. Belum optimalnya program kerja sama antar daerah, swasta dan masyarakat	a. Tersedianya Lembaga-lembaga Litbang (PTN/PTS, Balai-balai Penelitian, Lembaga-lembaga peneliti/Jasa Konsultan lainnya) yang bisa menjadi mitra kerja kegiatan penelitian dan pengembangan
4		Belum optimalnya pemanfaatan budaya ekosistem inovasi di kalangan Pemerintah, Masyarakat, Akademisi dan Pelaku Usaha dalam upaya peningkatan kinerja inovasi di daerah	a. Masih kurangnya pemahaman OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi tentang Inovasi Daerah	b. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah c. Adanya Pusat Jejaring Inovasi Daerah dari Kemendagri yang bertujuan mendorong inovasi pelayanan publik di Pemerintahan Daerah
5		Belum optimalnya implementasi Iptek bagi pembangunan di daerah	a. Belum berkembangnya pemanfaatan Iptek untuk pembangunan daerah	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

3.3. TELAAH RENSTRA K/L

a. Visi Dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Rencana Strategis BPP Kemendagri RI merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2020-2024 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Badan Litbang dan alat bantu dalam menjalankan kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan seluruh Unit Kerja di lingkungan Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri selama kurun waktu 2020-2024. Penyusunan Rencana strategis Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 akan menjabarkan secara komprehensif yang memuat visi, misi, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun mendatang.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, BPP Kemendagri mempunyai tugas “Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintah Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Tugas yang diemban oleh BPP diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif bagi tersusunnya kebijakan pemerintahan dalam negeri yang berkualitas, serta efektif dan efisien dalam penerapannya. Untuk itu, Visi Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkan Visi Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri yakni **“Menjadi Mitra Terpercaya dalam perumusan Kebijakan yang Responsif,**

Antisipatif dan Inovatif". Pernyataan visi tersebut seutuhnya guna mewujudkan Visi : *"Kementerian dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri"*.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, maka Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu rumusan kebijakan pemerintah dalam negeri berbasis penelitian dan pengembangan (*research based policy*).
2. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Mewujudkan kelembagaan litbang yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna perwujudan reformasi birokrasi.

b. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

Dengan mempertimbangkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, maka Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional menetapkan visi : ***"Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"***.

Kemampuan invensi dan inovasi dimaksudkan untuk menghasilkan produk hasil riset yang dilaksanakan dan inovasi yang berpotensi, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai sebagai keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan

penerapan iptek yang ditunjang oleh pembangunan faktor input (kelembagaan, sumber daya, dan jaringan).

Sementara itu, makna daya saing bangsa adalah kontribusi iptek dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, dan Perguruan Tinggi) dan SDM yang berkarakter unggul dan berwawasan kebangsaan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah :

1. Peningkatan Kapabilitas IPTEK, Budaya Riset dan Penciptaan Inovasi melalui peningkatan Kualitas SDM IPTEK, Penguatan Transformasi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan berlandaskan Budaya Iptek untuk Peningkatan Daya Saing.
2. Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

Dalam pengembangan iptek, pemerintah daerah berperan aktif dalam penguatan sistem inovasi melalui pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Hasil pengembangan SIDa diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Institusi penelitian, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menghasilkan dokumen penelitian pembangunan berdasarkan proses penelitian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penelitian Pembangunan Nasional. Penelitian dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan penelitian antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan

konsistensi antara penelitian, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Namun dalam upaya mengoptimalkan peran dan pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi berbagai permasalahan timbul. Adapun faktor penghambat dan faktor pendorong dari Pelayanan Balitbangda yang mempengaruhi pelayanan OPD, yaitu :

1. Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya jumlah dan kepakaran/kompetensi fungsional peneliti serta penempatan aparatur belum sesuai dengan prinsip *The Right Man In The Right Place*.
- b. Masih terdapat ego sektoral pada masing-masing OPD yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi
- c. Proses penyusunan kebijakan masih belum didasarkan pada hasil-hasil penelitian dengan kata lain Penelitian belum dijadikan landasan/rekomendasi dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah
- d. Masih terbatasnya jumlah hasil inovasi dan dukungan iptekin yang aplikatif guna mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan.

2. Faktor Pendorong

- a. Regulasi (Peraturan Perundang-undangan) sebagai payung hukum pelaksanaan Tupoksi Balitbangda Provinsi Jambi sebagai lembaga resmi pemerintah daerah yang mempunyai tupoksi pelaksana litbang dan inovasi.
- b. Komitmen Pemerintah Daerah sudah mulai tumbuh dalam mendukung penelitian dan pengembangan di Provinsi Jambi
- c. Sumber daya alam yang mendukung, yang harus dicari teknologinya, sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap produk tersebut dan dapat berdaya saing dengan produk yang sama
- d. Motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja

- e. Kerjasama dengan lintas sektoral : Perguruan Tinggi, Balai Penelitian, OPD.
- f. Banyaknya permasalahan yang perlu diteliti/dikaji untuk masukan kebijakan daerah maupun permasalahan di masyarakat

3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

a. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 memuat peruntukan ruang di wilayah Provinsi Jambi, agar terwujud ruang wilayah yang harmonis dan merata berbasis pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan. Isu yang berkembang di wilayah Provinsi Jambi, yaitu :

1. Isu sistem dan jaringan perkotaan dimana banyak pihak yang menilai bahwa sistem transportasi di wilayah Provinsi Jambi masih dirasakan kurang memadai.
2. Isu pengembangan pantai timur yang perlu dioptimalkan pemanfaatannya.
3. Isu adanya kawasan yang rawan bencana alam.
4. Isu terhadap optimalisasi pemanfaatan lahan berupa tumpang tindih perizinan dan lain.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi Jambi, maka kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi :

- a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat, tengah dan timur (Strategi yang diambil adalah : mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan;
- b. meningkatkan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer;
- c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang

- pengembangan pusat-pusat pelayanan di PKN, PKNp, PKW, PKWp dan PKL; dan d. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam di wilayah barat, tengah dan timur melalui pengolahan produk pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan);
- b. pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah (Strategi yang diambil adalah : meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan; b. meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan; c. meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa infrastruktur dan sarana pendukung lainnya; meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan; dan e. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.);
- c. pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah (Strategi yang diambil adalah : mengembangkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada; b. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan; c. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif; dan d. meningkatkan pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan);
- d. penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah (Strategi yang diambil adalah : melakukan pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai kriteria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melakukan

- promosi PKW yang berada pada kawasan andalan yaitu Perkotaan Sarolangun dan Perkotaan Muara Bungo untuk diarahkan menjadi PKNp; c. melakukan pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRW Nasional; d. meningkatkan dan menetapkan Perkotaan Sungai Penuh, Perkotaan Bangko, Perkotaan Muara Sabak, Perkotaan Muara Tebo dan Perkotaan Sengeti menjadi PKW yang dipromosikan (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; dan e. menetapkan Perkotaan Batang Sangir, Sanggaran Agung, Siulak, Sungai Manau, Pasar Masurai, Rantau Panjang, Pasar Pamenang, Pekan Gedang, Singkut, Pauh, Rantau Kelayang, Embacang Gedang, Tuo Limbur, Rantau Ikil, Wiroto Agung, Sungai Bengkal, Simpang Sungai Rengas, Muara Tembesi, Muara Jangga, Pijoan, Sebapo, Marga, Tanjung, Merlung, Tebing Tinggi, Serdang Jaya, Mendahara, Nipah Panjang dan Pandan Jaya, menjadi PKL untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan);
- e. penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan (Strategi yang diambil adalah : a. meningkatkan pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun; b. mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi; dan c. melakukan sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun); dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara (Strategi yang diambil adalah : a. mendukung penetapan kawasan pertanahan dan keamanan di wilayah provinsi;

b. mengembangkan kawasan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun; dan c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/Tentara Nasional Indonesia.;

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS bertujuan untuk mengintegrasikan aspek pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan ke dalam penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026. KLHS sendiri memuat kajian tentang :

1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH) untuk pembangunan;
2. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
3. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan kajian atas permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Balitbangda Provinsi Jambi dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut serta telaahan Visi dan Misi Provinsi Jambi, maka berikut isu-isu strategis Balitbangda Provinsi Jambi :

1. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Keberadaan Balitbangda Provinsi Jambi, diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan OPD Provinsi Jambi dalam menyusun

perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan Litbang harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah

2. Belum optimalnya kemitraan/jejaring penelitian dan penerapan Iptek.

Keterbatasan SDM peneliti (baik kepakaran dan jumlah) Balitbangda Provinsi Jambi akan diatasi dengan mengembangkan Kemitraan/Jejaring penelitian dan penerapan Iptek. Sumber daya Iptek seperti lembaga Litbang kementerian dan perguruan tinggi negeri maupun swasta cukup banyak terdapat di Provinsi Jambi. Keberadaannya dapat dijadikan sebagai mitra dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek dan peningkatan kapabilitas Balitbangda Provinsi Jambi.

Balitbangda Provinsi Jambi merupakan salah satu PD dalam lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi yang keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari PD lain. Hubungan kerja antara Balitbangda Provinsi Jambi dengan PD lain ditunjukkan pada proses awal lahirnya kegiatan penelitian dan pada tahap pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang harus berkoordinasi dengan Dinas Teknis yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan program dan kegiatan sektoral.

Selain dengan lembaga Litbang kementerian dan perguruan tinggi negeri maupun swasta, penguatan Kemitraan/Jejaring penelitian dan penerapan Iptek juga dilakukan dengan institusi/lembaga Litbang di Kabupaten/Kota.

3. Belum optimalnya pemanfaatan ekosistem inovasi sebagai budaya baru di kalangan Pemerintah, Masyarakat, Akademisi dan Pelaku Usaha dalam upaya peningkatan kinerja inovasi di daerah.
4. Belum optimalnya implementasi Iptek bagi pembangunan di daerah.
5. Meningkatkan predikat Nilai SAKIP Balitbangda Provinsi Jambi menjadi “BB”.

Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan penelitian pembangunan di daerah, terutama dalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Balitbangda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penelitian berkualitas dengan mengedepankan pendekatan penelitian partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas penelitian teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM penelitian, memantapkan kelembagaan penelitian serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan diatas beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan penelitian pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.
2. Proses dan mekanisme penelitian pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme penelitian pembangunan daerah.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penelitian pengembangan daerah.
5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi penelitian dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara penelitian dan penganggaran.
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses penelitian
7. Meningkatnya kualitas SDM penelitian terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional penelitian yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian Pembangunan Daerah.
8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi penelitian pembangunan.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2016, bahwa Tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah langsung mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu untuk mencapai visi ***“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT (MANTAP)”***, misi yang terkait dengan Urusan penunjang Pemerintahan Provinsi Jambi dalam bidang Penelitian dan Pengembangan adalah pada Misi Kesatu yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 maka tujuan dan sasaran Balitbangda Provinsi Jambi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai berikut :

Dalam Upaya mewujudkan Misi Kesatu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung e-governmant yang terintegras maka **Tujuan** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Kajian Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah maka ditetapkan Sasaran Strategis T₁S₁: Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi; T₁S₂ : Meningkatkan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan; dan

T₁S₃ : Meningkatnya Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah untuk Mendukung Daya Saing Daerah.

Pencapaian sasaran strategis Balitbangda Provinsi Jambi merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program Blitbangda Provinsi Jambi 2021-2026. Indikator sasaran perlu ditetapkan agar pencapaian sasaran strategis dapat lebih terukur dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut lebih terarah. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Provinsi Jambi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Kajian Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian Kelitbang, Penerapan IPTEK dan Inovasi untuk dimanfaatkan sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	BB	BB	BB	BB	BB
			Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase rekomendasi/ naskah akademik/ model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	60%	65%	70%	75%	80%
				Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang masuk dalam Jurnal Ilmiah	30%	40%	45%	50%	50%

			Meningkatnya Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah untuk Mendukung Daya Saing Daerah	Indeks Inovasi Daerah	59,50	60,00	60,50	61,00	61,50
				Persentase OPD kategori Inovatif dan Sangat Inovatif	30%	35%	40%	50%	50%
				Persentase teknologi yang dikembangkan atau diimplementasikan stakeholder	80%	80%	80%	80%	80%
				Persentase Dokumen yang siap didaftarkan HKI-nya	80%	80%	80%	80%	80%
				Persentase Kerjasama yang terjalin	80%	80%	80%	80%	80%

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan jangka menengah Balitbangda Provinsi Jambi menunjukkan bagaimana cara Balitbangda Provinsi Jambi mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya internal dan dukungan eksternal yang tersedia. Strategi tersebut meliputi :

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran dengan Arah Kebijakan Strategi Balitbangda Provinsi Jambi

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Kajian Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Peningkatan Kuliatas Laporan Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Melakukan konsultasi dengan OPD pembina dan pengawas Perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	1. Penyiapan landasan regulasi/kebijakan yang menjadi prioritas dan isu strategis 2. Mendorong pemantapan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan yang berkualitas	1. Penyusunan RIK 2. Peningkatan dukungan anggaran penelitian dan pengembangan yang dibarengi dengan perbaikan kualitas dan kemanfaatan output litbang 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penelitian dan pengembangan 4. Peningkatan kualitas dan sinergitas program penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada kemanfaatan hasil 5. Melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, melalui penyediaan dan penyebarluasan kertas kerja kebijakan (policy paper) dan risalah kebijakan (policy brief) kepada para pemangku kepentingan 6. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (problem solving) melalui pemanfaatan hasil Litbang

				7. Publikasi hasil kelitbangan melalui berbagai bentuk media cetak dan elektronik, seperti penulisan ilmiah terakreditasi, seminar nasional dan diskusi publik
		Meningkatnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah untuk mendukung daya saing daerah	1. Fasilitasi penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Fasilitasi penguatan penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 3. Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi ke masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya KI/invensi 4. Pengembangan jejaring kemitraan antar institusi penelitian dan pengembangan	1. Pengkoordinasian program SIDA dengan OPD di Pemerintah Provinsi Jambi dan Badan Litbang Kab/Kota se-Provinsi Jambi 2. Pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan komoditi SIDA 3. Penilaian pelaksanaan inovasi di OPD 4. Fasilitasi dan pembinaan inovasi OPD secara sinergi dan terpadu 5. Pemberian penghargaan dan penyediaan insentif bagi OPD inovatif 6. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan OPD terkait Pemerintah Provinsi Jambi dan Balitbangda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi 7. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, inkubator bisnis dan masyarakat 8. Meningkatkan motivasi masyarakat untuk mendaftarkan Kekayaan intelektual 9. Memfasilitasi masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektual 10. Meningkatkan kerja sama dengan peneliti/perekayasa, perguruan tinggi dan badan litbang lainnya

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplentasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran OPD. Penyusunan program berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan daerah dan sesuai tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi.

Kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolak ukur dan memiliki kinerja yang dilaksanakan setiap tahunnya. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Jambi dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
- c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
- d. Kegiatan Pengembangan Teknologi dan Inovasi.

Rincian program, kegiatan serta indikator disajikan dalam Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Tabel 6.1. di bawah ini.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelompok Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2020)													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Kajian Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	Persentase Kajian Ketersediaan Hasil Kajian Kelitbangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi untuk dimanfaatkan sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROIUVINSI	Nilai AKIP		BB Predikat	BB Predikat	12,084,630,000	BB Predikat	12,295,500,000	BB Predikat	13,168,750,000	BB Predikat	14,022,000,000	BB Predikat	14,345,250,000	BB Predikat	65,916,130,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	Balitbangda Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota dan Instansi Terkait	100%	100%	525,000,000	100%	590,000,000	100%	660,000,000	100%	730,000,000	100%	800,000,000	100%	3,305,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	JAMBI
				5.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Balitbangda Provinsi Jambi (Dokumen)		3	7	325,000,000	7	340,000,000	7	360,000,000	7	380,000,000	7	400,000,000	35	1,805,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		1	2	20,000,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	60,000,000	10	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)		1	2	20,000,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	60,000,000	10	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		1	2	20,000,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	60,000,000	10	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1	2	20,000,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	50,000,000	2	60,000,000	10	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		7	8	90,000,000	8	95,000,000	8	100,000,000	8	105,000,000	8	110,000,000	40	500,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	5	200,000,000		
				5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi	100%	100%	8,985,000,000	100%	9,290,000,000	100%	9,495,000,000	100%	9,700,000,000	100%	9,905,000,000	100%	47,375,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		NA	50	8,900,000,000	55	9,200,000,000	60	9,400,000,000	65	9,600,000,000	70	9,800,000,000	300	46,900,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		NA	30	85,000,000	33	90,000,000	36	95,000,000	39	100,000,000	41	105,000,000	179	475,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	76,000,000	100%	80,000,000	100%	85,000,000	100%	90,000,000	100%	95,000,000	100%	426,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		2	2	76,000,000	2	80,000,000	2	85,000,000	2	90,000,000	2	95,000,000	10	426,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi	100%	100%	162,250,000	100%	185,500,000	100%	208,750,000	100%	232,000,000	100%	305,250,000	100%	1,093,750,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya (Paket)		NA	1	42,250,000	1	45,500,000	1	48,750,000	1	52,000,000	1	55,250,000	5	243,750,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		8	12	120,000,000	14	140,000,000	16	160,000,000	20	180,000,000	25	250,000,000	87	850,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi, Sarana Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi	100%	100%	785,000,000	100%	855,000,000	100%	925,000,000	100%	995,000,000	100%	1,065,000,000	100%	4,625,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		NA	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	5	125,000,000	BALITRANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		NA	2	150,000,000	2	175,000,000	2	200,000,000	2	225,000,000	2	250,000,000	10	1,000,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		0	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	35,000,000	5	125,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		NA	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	5	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		NA	2	45,000,000	2	50,000,000	2	55,000,000	2	60,000,000	2	65,000,000	10	275,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)		NA	1	10,000,000	1	15,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	5	100,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)		50	40	420,000,000	45	440,000,000	50	460,000,000	55	480,000,000	60	500,000,000	250	2,300,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dokumen)		NA	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi, Sarana Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi	100%	100%	525,000,000	100%	130,000,000	100%	490,000,000	100%	825,000,000	100%	560,000,000	100%	2,530,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 2)		0	2	400,000,000	0	0	0	350,000,000	5	125,000,000	2	400,000,000	9	1,275,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 4)		1	1		0	1	0	0	0	1	3					
				5.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		0	0	0	0	0	0	0	1	550,000,000	0	0	1	550,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		0	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	5	200,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)		0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	250,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	12	45,000,000	16	45,000,000	20	50,000,000	24	55,000,000	28	60,000,000	100	255,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi	100%	100%	410,000,000	100%	485,000,000	100%	560,000,000	100%	635,000,000	100%	710,000,000	100%	2,800,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		0	12	40,000,000	12	45,000,000	12	50,000,000	12	55,000,000	12	60,000,000	60	250,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		0	12	150,000,000	12	200,000,000	12	250,000,000	12	300,000,000	12	350,000,000	60	1,250,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		0	2	220,000,000	2	240,000,000	2	260,000,000	2	280,000,000	2	300,000,000	10	1,300,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi, Sarana Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi	100%	100%	616,380,000	100%	680,000,000	100%	745,000,000	100%	815,000,000	100%	905,000,000	100%	3,761,380,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)		23	20	305,380,000	23	310,000,000	23	315,000,000	24	320,000,000	29	350,000,000	119	1,600,380,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		0	4	136,000,000	4	140,000,000	4	145,000,000	4	155,000,000	5	160,000,000	21	736,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		30	30	25,000,000	30	30,000,000	30	35,000,000	30	40,000,000	30	45,000,000	150	175,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)		1	1	150,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	1	300,000,000	1	350,000,000	5	1,250,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
		Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase rekomendasi/ naskah akademik/ model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya		50%	60%	6,302,300,000	65%	7,548,750,000	70%	7,569,600,000	75%	7,580,070,000	80%	8,590,070,000	80%	37,590,790,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau pihak lainnya pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder dan Masyarakat	50%	60%	1,580,000,000	65%	1,855,000,000	70%	1,857,500,000	75%	1,865,000,000	80%	2,120,000,000	80%	9,277,500,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.02.1.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		0	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		0	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000		
				5.05.02.1.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		-	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)		-	8	50,000,000	8	55,000,000	8	57,500,000	8	65,000,000	8	70,000,000	40	297,500,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.02.1.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)		0	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.14	Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)		0	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya pada Bidang Sosial dan Kependudukan	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder dan Masyarakat	50%	60%	1,660,000,000	65%	1,980,000,000	70%	1,985,000,000	75%	1,980,000,000	80%	2,255,000,000	80%	9,860,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial (Dokumen)		-	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	185,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	900,000,000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.02.1.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder dan Masyarakat	50%	60%	1,885,000,000	65%	2,340,000,000	70%	2,340,000,000	75%	2,340,000,000	80%	2,665,000,000	80%	11,570,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)		-	1	200,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	945,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		-	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.09	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)		-	1	15,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	760,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.02.1.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)		-	1	160,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	905,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)		-	1	150,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	180,000,000	1	205,000,000	5	895,000,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
		Meningkatnya Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah untuk Mendukung	Indeks Inovasi Daerah	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diaplikasikan perangkat daerah	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder, Perguruan Tinggi dan Masyarakat	NA	60%	1,177,300,000	65%	1,373,750,000	70%	1,387,100,000	75%	1,395,070,000	80%	1,550,070,000	80%	6,883,290,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.04.01	Penelitian dan Pengembangan dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)		0	2	200,000,000	2	250,000,000	1	253,000,000	1	254,500,000	1	310,000,000	7	1,267,500,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Penerapan Teknologi (Laporan)		0	5	400,000,000	5	410,000,000	5	415,000,000	5	416,570,000	5	450,000,000	25	2,091,570,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)		0	3	250,000,000	3	289,575,000	3	290,000,000	3	291,500,000	3	300,070,000	15	1,421,145,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan		3	3	227,300,000	3	277,000,000	3	279,100,000	3	280,000,000	3	320,000,000	15	1,383,400,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)		0	1	100,000,000	1	147,175,000	1	150,000,000	1	152,500,000	1	170,000,000	5	719,675,000	BALITBRANGDA PROVINSI JAMBI	
					JUMLAH					18,386,930,000		19,844,250,000		20,738,350,000		21,602,070,000		22,935,320,000		103,506,920,000		

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2021-2026 ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Renstra Balitbangda Provinsi Jambi disusun dapat diukur melalui indikator kinerja dari sasaran. Indikator Kinerja yang dimaksud adalah Indikator Kinerja Balitbangda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 7.1. di bawah ini.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Jambi yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
			Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	
			5	6	7	8	9	10
1	Nilai AKIP	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Persentase rekomendasi /naskah akademik/ model yang diaplikasikan <i>Perangkat Daerah atau Pihak Lain</i>	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%

BAB 8

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Renstra Balitbangda Provinsi Jambi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi.

Keberhasilan Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh *stakeholder* yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

**KEPALA BALITBANGDA
PROVINSI JAMBI**



Ir. A Z F I N, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660224 199203 1 002